

IMPLEMENTASI FUNGSI PARTAI POLITIK SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN POLITIK DI MASYARAKAT

Aprillio Poppy Belladonna

Program Studi PPKn, Jurusan Pendidikan IPS, STKIP Pasundan Cimahi, Bandung.

Email: Aprillio_poppy@yahoo.co.id

Abstrak

Pendidikan Politik masyarakat kini masih dikatakan minim, ditandai dengan mewabahnya sikap partisipasi pasif masyarakat. Dalam hal ini untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dapat dilaksanakan melalui fungsi partai. Partai politik dianggap mampu dalam mengatasi permasalahan ini karena melihat pergerakan politik yang sangat aktif. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif, dengan cara memperoleh informasi selengkap mungkin melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Temuan hasil penelitian, bahwa belum maksimal dirasakan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami benar mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam dunia politik, melalui program yang dilaksanakan oleh partai dalam memberikan pendidikan politik banyak menghadapi kendala dimulai dari objeknya sendiri yaitu masyarakat, anggota partai yang memiliki karakter yang berbeda sehingga dapat menghambat kinerja partai, namun upaya yang dilakukan partai dalam mengatasi kendala yakni dengan meningkatkan kualitas program dan kinerja partai dalam melaksanakan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Kata Kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik, Partisipasi Politik.

Abstract

Society's political education is still said to be minimal, marked by the outbreak of people's passive participation. In this case to increase the political participation of the community can be carried out through party functions. Political parties are considered capable of overcoming this problem because they see a very active political movement. The method in this study uses a qualitative approach with descriptive research, by obtaining as complete information as possible through interviews, observation and documentation studies. The findings of the research show that it has not been maximally felt, so there are still many people who do not really understand the rights and obligations as responsible citizens and play an active role in politics, through programs carried out by the party in providing political education many obstacles start from the object themselves, namely the community, party members who have different characters so that they can hamper party performance, but the efforts made by the party in overcoming obstacles are by improving the quality of the program and party performance in carrying out political education to increase the political participation of the community.

Keywords: Political Parties, Political Education, Political Participation.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia yang telah berlangsung lebih satu dekade, yang telah membuka kebebasan politik dan telah berhasil mendorong lahirnya perubahan di beberapa aspek kehidupan bangsa serta awal dari berkembangnya demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini Gaffar, (2006: 44) memaparkan bahwa “keberhasilan Indonesia dalam menghadapi transisi politik sangat bergantung bagaimanaantisipasi pemerintah dan masyarakat menyangkut dua hal utama, yaitu pertama, masalah kesenjangan sosial antara golongan. Kedua, menyangkut monopoli dan praktis bisnis yang seringkali dianggap kurang tepat dalam suatu masyarakat yang selalu berbicara tentang keadilan sosial”.

Dalam hal ini praktek demokrasi dalam berbagai pranata dijadikan sebagai tiang demokrasi. Salah satu pranata ini ialah Partai Politik. Sehubungan dengan hal ini Budiardjo (2008: 404) mengemukakan bahwa “partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan mereka”.

Posisi partai politik disinilah yang diharapkan dapat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat, karena partai politik merupakan lembaga infrastruktur negara yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti yang diungkapkan oleh Alfian (1978: 236) menyatakan bahwa :

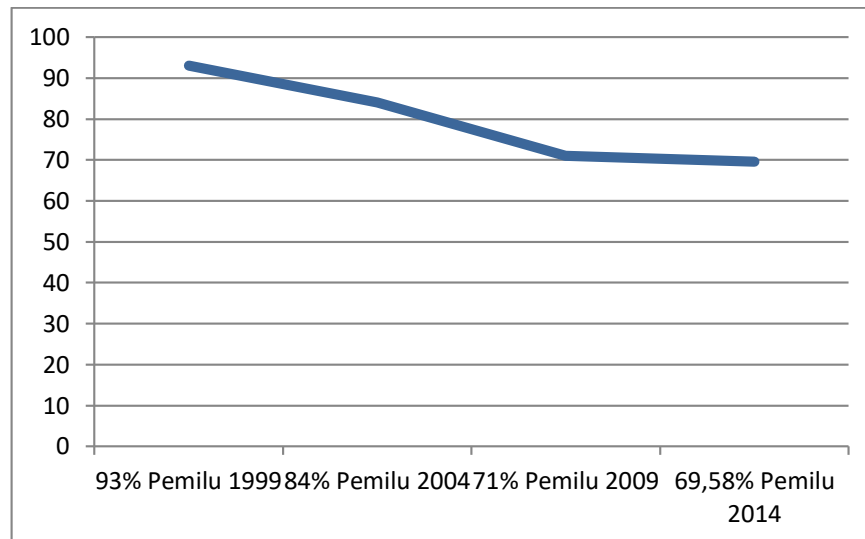
Keberhasilan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi. Dimensi pertama berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan. Dari situ akan kelihatan apa-apa sebenarnya yang dituntut oleh sistem politik ideal itu dari masyarakat yang menginginkannya. Dimensi kedua ialah realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan-tuntutan sistem politik ideal tadi. Melalui perbandingan itulah akan diperoleh suatu perspektif yang jelas bagi pendidikan politik yang selanjutnya akan dapat dipakai untuk menjuruskannya.

Dapat disimpulkan berdasarkan memaparkan diatas bahwa pendidikan politik terhadap masyarakat merupakan pendidikan wajib karena dapat meminimalisir sikap pasif masyarakat. Dengan memberikan pemahaman akan pentingnya hak politik masyarakat. Maka partai politik harus pembantu pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Namun pada kenyataannya Indonesia jauh dari suasana politik ideal hal ini diakibatkan budaya sikap partisipasi masyarakat masih kurang karena minimnya pendidikan politik itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat dari perjalanan Indonesia dari pemilu 1999 sampai 2014 tingkat partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum mengalami penurunan. Dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap integritas institusi secara umum belum cukup memuaskan dapat dilihat dari fakta sebagai berikut:

Gambar 1.1

Presentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum di Indonesia



Sumber: Survei KPU dalam Media Cetak Kompas.

Berdasarkan data tersebut penurunan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai menurun terhadap dunia politik diakibatkan dinamika politik Indonesia yang terus mengalami permasalahan yang kompleks. Masyarakat menilai banyak terjadinya kasus korupsi, narkoba dikalangan pejabat pemerintahan yang menjadikan sikap partisipasi pasif masyarakat.

Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik yang tergolong masih rendah, hal ini dikarenakan efektivitas sosialisasi yang masih kurang dan kebanyakan masyarakat tidak menyalurkan hak pilihnya, peran, kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara. Seharusnya ditekankan pada peranan partai politik dalam mensosialisasikan pendidikan politik keseluruhan lapisan masyarakat. Hal ini merupakan cara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya terhadap aktivitas politik.

Keberadaan partai politik sangat diperlukan dalam menjalankan fungsinya dengan baik, partai pada dasarnya memiliki fungsi dalam memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah sehingga mencerminkan keberlangsungan negara demokrasi yang ideal.

Peneliti memandang perlu adanya pengetahuan lebih tentang politik untuk memberikan pandangan terhadap pentingnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik pada saat ini supaya menjadi perbaikan yang kurang atau belum melaksanakan fungsinya sebagai wahana pendidikan politik. Dalam hal ini peneliti mengambil penelitian terhadap partai PKS dengan alasan bahwa partai PKS adalah partai yang telah malang melintang dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Hal ini membuktikan bahwa partai PKS masih mendapatkan kepercayaan yang besar dari rakyat Indonesia.

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap DPD PKS Kabupaten Bandung sebagai salah satu wadah atau organisasi pada fungsinya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai wahana pendidikan politik.

Pengertian Partai Politik

Partai politik disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yaitu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seperti halnya definisi yang dikemukakan oleh Amal (1988: 11) mengatakan bahwa “partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah kumpulan dari orang-orang yang terorganisir yang memiliki kepentingan tertentu untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan serta menguasai pemerintah agar tercapai tujuan bersama yaitu memberikan kemanfaatan bagi anggotanya.

Hal lain juga dikemukakan oleh Hagopian (dalam Amal, 1988: 11) menurutnya Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Partai politik didefinisikan sebagai kelompok atau organisasi yang memiliki suatu tujuan bersama untuk menduduki atau mempertahankan penguasaan di suatu pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selain itu, Friedrich (dalam Budiardjo, 2008: 404) menuliskan bahwa Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap di suatu pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materil.

Tujuan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dibagi menjadi tujuan khusus dan tujuan umum yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2), yaitu:

1. Tujuan umum partai politik adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
- d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Tujuan khusus partai politik adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan
- b. Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian di atas penulis berpandangan bahwa tujuan partai politik sebenarnya memberikan arahan kepada warga negara tentang tawaran partai sendiri. Selain itu perasaan nyata partai juga harus mutlak dirasakan oleh warga masyarakat.

Pendidikan Politik

Pendidikan politik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran berpolitik warga negara. Pendidikan politik (*political education*) sebagai salah satu konsep dari ilmu politik yang berkenaan dengan bagaimana usaha yang dilakukan agar warga negara atau masyarakat dapat memahami dan mengerti politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumantri (dalam Wuryan & Syaifullah, 2008: 71) yang menyatakan bahwa:

Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Hal ini berarti pendidikan politik menekankan kepada upaya pemahaman tentang nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Pendidikan politik di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan kesadaran politik yang tinggi bagi warga negara, sehingga mereka sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk kesadaran untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

METODE PENELITIAN

Lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang didalamnya adalah Studi kepustakaan, dalam hal ini mempelajari dan menganalisis berbagai *literature* yang berkaitan dengan Fungsi Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Studi lapangan, yaitu Observasi, Wawancara dan Studi Dokumentasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa kini, dan memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Moleong (2007: 3) mengutarakan bahwa: “Pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Kesimpulannya bahwa pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif baik itu berupa tulisan maupun lisan dari para responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Masyarakat Terhadap Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa partai politik yang melaksanakan program untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai politik kepada masyarakat disekitarnya dalam melaksanakan programnya tersebut memiliki tujuan tertentu. Mulai dari memberikan informasi mengenai program kerjanya, mendengarkan aspirasi dan pendapat masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat, hingga meminta dukungan dari masyarakat agar mendukung partainya. Sejalan dengan hasil wawancara dalam hal ini Budiardjo (2008: 406) mengatakan “Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah”. Dengan demikian terjadinya arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan dari bawah ke atas. Dalam hal ini partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.

Partai politik dalam melaksanakan kegiatan politik tentu harus sesuai dengan peran dan fungsinya agar tercipta nuansa harmonis dalam penerapannya dikehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Budiardjo (2009: 405-409) menyebutkan “fungsi partai politik adalah sebagai

sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi, sebagai rekrutmen dan sebagai sarana pengatur konflik”.

Pendapat di atas mengenai fungsi partai politik, dapat disimpulkan bahwa partai politik memiliki peran sentral dalam hal seleksi politik. Namun dalam menjalankan fungsinya, tetap saja harus di iringi dengan kerja sama antara pemimpin partai dan anggotanya agar fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Terdapat beberapa fungsi yang tampaknya selalu terkandung baik secara eksplisit maupun implisit. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Menurut Surbakti (1999: 118) mengungkapkan bahwa “rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik umumnya dan pemerintahan pada khususnya”. Dimana fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan perannya, kelangsungan sistem politik akan terancam.

Hal tersebut senada dengan yang diutarakan oleh Budiardjo (2008: 164) bahwa “Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political rekrutment*). Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pemimpin lama (*selection of leadership*).

Dalam praktiknya tidak semua rekrutmen politik untuk jabatan politik benar-benar terbuka. Seringkali partai politik yang memberikan kewenangan untuk melaksanakannya, dimana elit partai kadangkala hanya merekrut atau memprioritaskan orang-orang yang dekat dengan mereka.

2. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa. Menurut Surbakti (2010: 149) yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima

pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Yang dimaksud indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima norma, nilai dan simbol yang dianggap pihak penguasa sebagai ideal dan baik.

Disinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

3. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Budiardjo (2008: 406) mengatakan “Partai politik berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah”. Dengan demikian terjadinya arus informasi dan dialog dua arah, dari atas kebawah dan dari bawah ke atas. Dalam hal ini partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah.

Pendapat lain dikemukakan oleh Surbakti (1999: 119) “komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah”. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diperankan oleh partai politik juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

4. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi masyarakat yang bersifat heterogen, baik dari segi etnis, sosial-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Disini peran partai diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin.

Menurut Surbakti (1999: 120) mengatakan bahwa:

Partai politik merupakan salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak, serta membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

Untuk mencapai penyelesaian berupa keputusan itu diperlukan kesediaan berkompromi diantara wakil yang berasal dari partai politik. Apabila partai politik merasa keberatan untuk mengadakan kompromi, maka partai politik bukannya mengendalikan konflik, melainkan malah menciptakan konflik dalam masyarakat.

Menurut Djiwandono (dalam Sudiono, 2004: 78) mengemukakan tiga jalan yang dapat ditempuh dalam pelaksanaan pendidikan politik, yaitu:

- a. Melalui pendidikan politik formal meskipun tidak menggunakan istilah pendidikan secara eksplisit
- b. Melalui pendidikan non formal yaitu, melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan
- c. Media pendidikan masyarakat dan dalam hubungan ini peranan media massa, baik cetak maupun elektronik tentu sangat besar.

Menurut Ramdlon (dalam Affandi, 2011: 6) yang menyatakan bahwa “Pendidikan politik sebagai usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga negara dalam berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap berbangsa dan bernegara”.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran yang dimaksud adalah sadar mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga negara, karena pada dasarnya pendidikan politik merupakan pendidikan yang diarahkan kepada peningkatan status warga negara menuju warga negara yang baik (*good citizen*) yang sadar akan peran terhadap hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Partai politik, terutama di negara berkembang yang masih membutuhkan pembentukan karakter warga negara yang kuat. Mereka dituntut untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang melek politik. Apabila partai politik sungguh-sungguh menjalankan fungsi pendidikan politik tersebut, seperti halnya pendapat Maksudi (2012: 276) maka rakyat akan:

- a. Makin sadar akan hak dan tanggungjawab politiknya
- b. Makin banyak informasi politik yang diketahuinya
- c. Makin merasa bebas berdiskusi masalah politik dengan sejumlah orang
- d. Makin luas pandang politiknya
- e. Makin besar minat memasuki berbagai macam organisasi
- f. Makin kritis terhadap persoalan-persoalan bangsanya
- g. Makin mampu menyuarakan aspirasi politiknya kepada wakil-wakilnya yang duduk di DPR/DPRD.

Jadi dapat disimpulkan melalui partai politik maka pendidikan politik dapat diperoleh masyarakat dan memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran berpolitik

warga negara. Pendidikan politik sebagai salah satu konsep dari ilmu politik yang berkenaan dengan bagaimana usaha yang dilakukan agar warga negara atau masyarakat dapat memahami dan mengerti politik.

Partai PKS dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat di Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung

Dalam melaksanakan pendidikan politik partai politik tentunya menjalankan program-program yang menunjang pelaksanaan kegiatan, dimana program yang dimiliki partai PKS dalam hal pendidikan politik melaksanakan program antara lain:

1. Program pertama, yaitu melalui program-program anggota dewan jika ada waktu reses, berupa konsolidasi atau dipastikan terjun langsung kelapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, tentang bagaimana mewujudkan aspirasi masyarakat baik itu hasil interaksi langsung dengan masyarakat umum yang di olah oleh DPRD menjadi kebijakan pembangunan masyarakat, yang berasal dari masyarakat kemudian nanti dirasakan pula oleh masyarakat.
2. Program kedua, melalui *ta'lim* rutin partai yaitu upaya partai untuk menyampaikan berbagai kajian politik. Dalam hal ini program TOP yang disebut Treaning Orientasi Partai yang merupakan pemahaman tentang politik sejauhmana politik itu harus dikembangkan dan juga harus dilaksanakan.
3. Program ketiga, melalui sosial media PKS memiliki website resmi dimana banyak menyampaikan pendidikan politik, juga lewat tulisan-tulisan artikel, media twitter, facebook, semua sarana itu ditujukan untuk pendidikan masyarakat.

Program tersebut senada dengan salah satu fungsi partai politik menurut Surbakti (2010: 149) yang menyatakan bahwa:

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi dua yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik. Yang dimaksud indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima norma, nilai dan simbol yang dianggap pihak penguasa sebagai ideal dan baik.

Pada dasarnya jelas bahwa pendidikan politik dengan sosialisasi politik memiliki kaitan yang erat. Proses pendidikan politik dalam bentuk dialogis dapat dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai pandangan masyarakat terhadap politik, sehingga dapat diketahui sejauhmana

masyarakat mengetahui mengenai norma-norma, dan simbol-simbol politik dari berbagai pihak, salah satunya dari partai politik.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pendidikan politik PKS melaksanakan programnya yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai media pendidikan politik bagi masyarakat. Dimana Partai PKS mempunyai website resmi khususnya pengurus partai yakni kabupaten/kota seperti halnya DPD PKS Kabupaten Bandung dimana banyak menyampaikan pendidikan politik, juga lewat tulisan-tulisan artikel, media twitter, facebook, semua sarana itu ditujukan untuk pendidikan politik bagi masyarakat.

SIMPULAN

Pandangan masyarakat terhadap partai PKS bahwa dampak dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan cukup baik memberikan pendidikan politik. Sehingga masih banyak masyarakat memahami benar mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Program yang dimiliki partai PKS dalam hal memberikan pendidikan politik antara lain: (a) Program pertama, yaitu melalui program-program anggota dewan jika ada waktu reses, berupa konsolidasi atau terjun langsung kelapangan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat, tentang bagaimana mewujudkan aspirasi masyarakat baik itu hasil interaksi langsung dengan masyarakat umum yang di olah oleh DPRD menjadi kebijakan pembangunan masyarakat, yang berasal dari masyarakat kemudian nanti dirasakan pula oleh masyarakat. (b) Program kedua, melalui *ta'lim* rutin partai yaitu upaya partai untuk menyampaikan berbagai kajian politik. Adapula program TOP yang disebut Treaning Orientasi Partai yang merupakan pemahaman tentang politik sejauhmana politik itu harus dikembangkan dan juga harus dilaksanakan. (c) Program ketiga, melalui sosial media PKS memiliki website resmi dimana banyak menyampaikan pendidikan politik, juga lewat tulisan-tulisan artikel, media twitter, facebook, semua sarana itu ditujukan untuk pendidikan politik masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. (2011). Pendidikan Politik. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Alfian. (1978). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Amal, Ichlasul. (2012). *Teori Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Gaffar, Afan. (2006). *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Maksudi, Beddy Iriawan. (2012). *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoritik dan Empirik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L.J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja rosda Karya

- Sudiono, Dian. (2004). *Peranan Badan Perwakilan Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Desa di Era Otonomi Daerah*. (Skripsi)
- Surbakti, Ramlan. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo
- Wuryan, S & Syaifullah, S. (2008). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Undang-Undang RI Nomor No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai politik
- Kompas. (2016, 31Maret). [Online]. Diakses dari
<http://nasional.kompas.com/read/2014/07/23/16270771/Ternyata.Tingkat.Partisipasi.dalam.Pilpres.Menurun>